

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pengelolaan Informasi Keuangan Daerah (IKD) Tahun Anggaran 2021 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah belum mengatur informasi pemerintahan daerah dalam satu sistem yang terhubung sehingga perlu diganti, maka melalui SIPD sebagaimana ketentuan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12 menyebutkan bahwa “Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, diperlukan sistem yang bisa menjamin sepenuhnya jika pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat mencapai tujuannya dengan efektif, melaporkan pengolahan data keuangan negara dengan baik, melindungi aset milik negara, dan mendorong kepatuhan terhadap Hukum dan regulasi Undang-undang. Pada tahun 2021 Kemendagri memutuskan bahwa pengelola keuangan daerah akan menggunakan SIPD untuk menggantikan aplikasi SIMDA. “Aplikasi SIMDA merupakan aplikasi database yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD oleh sebab itu pengendalian terhadap aplikasi menjadi suatu keharusan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan” Djaja (2009). “SIPD adalah

suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah” (Hany 2015).

Sistem informasi akuntansi diartikan sebagai “Kumpulan (integrasi) dari sub-sub sistem/ komponen baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan” (Susanto, 2017:80). Sistem akuntansi mempunyai berbagai fungsi yaitu, mengolah data agar menjadi informasi untuk mengambil keputusan, mengumpulkan dan menyimpan data transaksi.

Unsur dalam Akuntansi dibagi menjadi lima bagian yaitu, “1.) Formulir merupakan dokumen yang digunakan sebagai catatan suatu transaksi. 2.) Jurnal ialah sistem yang digunakan untuk mendata, mengumpulkan transaksi sejenis dan merangkum data keuangan lainnya. 3.) Buku besar merupakan kumpulan rekening-rekening yang bertujuan untuk meringkas suatu data keuangan yang telah dicatat sebelumnya pada jurnal. 4.) Buku rekening pembantu, rekening anak perusahaan yang memuat data keuangan secara rinci. 5.) Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi, berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan beban pemasaran, laporan biaya produksi, laporan harga pokok penjualan, daftar hutang, daftar saldo persediaan” (Mulyadi, 2010: 3-5).

Perusahaan dan pemerintahan sangat membutuhkan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang bertujuan untuk perencanaan, pengambilan keputusan dan pengendalian internal kegiatan pemerintahan atau bisnis perusahaan. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang efektif sangat berguna untuk kesuksesan jangka panjang pemerintahan atau perusahaan. Sistem Informasi tentang Penggajian merupakan salah satu sistem informasi akuntansi yang paling penting. Sistem ini mencakup semua tahap pengelolaan gaji dan pelaporan personal. Dalam fungsi Penggajian, sistem informasi akuntansi sangat diperlukan karena menyediakan cara yang cukup dan akurat untuk membayar karyawan, menghasilkan laporan gaji yang diperlukan, dan memberikan informasi kepada manajemen tentang kebutuhan karyawan.

Sistem akuntansi pemerintah merupakan entitas pelapor dan akuntansi yang melakukan sistem akuntansi pemerintah daerah. Umumnya sistem akuntansi pemerintah daerah mencakup empat tahapan akuntansi, salah satunya yaitu pengeluaran kas. Hal ini merupakan komponen sumber daya yang sangat penting bagi pelaksanaan rencana pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah. Salah satunya adalah gaji dan upah, yang merupakan hak dan reward karyawan. Sistem akuntansi penggajian dan penggajian ada untuk memudahkan proses pembayaran upah dan upah sehingga dapat beroperasi lebih efisien.

Sistem akuntansi penggajian merupakan "Sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk memberi upah dan gaji kepada karyawannya atas jasa-jasa yang mereka berikan dan diatur agar dapat membayar gaji karyawan secara teratur dan untuk menyediakan data yang berguna untuk keperluan pengambilan keputusan oleh manajemen" (Sujarweni, 2015:127). Penggajian ialah

operasional pengelolaan data yang berhubungan dengan cara yang efektif dalam mengelola dan memberikan kompensasi untuk para pegawai. Adapun pengertian gaji adalah “Pembayaran atas jasa-jasa yang dilakukan oleh karyawan didasarkan pada sejumlah pekerjaan yang telah diselesaikan misalnya jumlah unit produksi” (Sujarweni, 2015:127) atau “Manfaat jasa yang diberikan secara teratur atas prestasi kerja yang diberikan kepada seorang karyawan. Perbedaan upah dan gaji hanya terletak pada kuatnya ikatan kerja dan jangka waktu penerimaannya Seseorang menerima gaji apabila ikatan kerjanya kuat. Dilihat dari jangka waktu penerimaannya, gaji pada umumnya diberikan setiap bulan” (Wursanto, 2010:53).

Berkenaan dengan latar belakang yang sudah dijelaskan oleh penulis, maka penulis mempunyai keinginan untuk Mengetahui Sistem Akuntansi Penggajian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang saat menggunakan Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) dan SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah). Hal tersebut dinaikkan dalam Laporan Tugas Akhir (TA) yang berjudul **“SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN JOMBANG DENGAN MENGGUNAKAN SIMDA DAN SIPD”**

1.2. Topik yang Dilaporkan pada Praktik kerja Lapangan

Topik yang diangkat dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah Sistem Akuntansi Penggajian Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang dengan Menggunakan SIMDA dan SIPD.

1.3. Tujuan Pelaporan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan pelaporan praktik kerja lapangan ini adalah Mengetahui Sistem Akuntansi Penggajian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang saat menggunakan Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) dan SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah).

1.4. Landasan Teori

1.4.1. Sistem Akuntansi

Sistem Akuntansi menurut (Mulyadi, 2016:3) adalah “Organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen untuk memudahkan pengelolaan perusahaan”. Sistem akuntansi adalah “suatu catatan-catatan organisasi yang dibuat untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi organisasi dan menyelenggarakan pertanggung jawaban bagi aktivitas dan kewajiban yang berkaitan” menurut (Bodnar dan Hopwood, 2008:181).

Sistem Akuntansi adalah “Suatu formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik untuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi perusahaan” (Baridwan, 2010:3).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan sistem akuntansi merupakan alat yang digunakan untuk mengatur dan mengumpulkan data tentang transaksi-transaksi

perusahaan untuk menghasilkan informasi yang digunakan oleh manajemen untuk memantau kebijakan perusahaan atau tindakan yang diambil Waktu proses. masa depan.

1.4.2. Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi menurut (Wilkinson, 2000), adalah “Sistem informasi yang mencakup semua fungsi dan aktivitas akuntansi, yang memperhatikan akibat yang akan ditimbulkan pada sumber daya ekonomi dari kejadian eksternal maupun operasi di internal organisasi”. Sistem informasi akuntansi adalah “Suatu rangkaian yang terdiri dari beberapa komponen yaitu orang-orang, prosedur-prosedur data *software* dan infrastruktur teknologi yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan” (Romney dan Steinbart Fitriasari, 2006:3). Namun, menurut (Jones dan Rama, 2009), “Sistem informasi akuntansi adalah sebuah subsistem dari sistem informasi manajemen, dimana subsistem tersebut menyediakan informasi akuntansi dan keuangan, bersamaan dengan informasi lainnya dalam proses transaksi akuntansi yang rutin”.

Sistem informasi akuntansi adalah “kumpulan sumber daya yang dirancang untuk merubah data keuangan dan data-data lainnya menjadi informasi. Informasi yang dihasilkan akan digunakan dalam berbagai bentuk untuk kepentingan pengambilan keputusan” (Hopwood dan Bodnar, 1998). Sistem informasi akuntansi adalah “Suatu bentuk sistem informasi yang memiliki tujuan untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha, memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada sebelumnya, memperbaiki pengendalian akuntansi dan juga pengecekan internal, serta

membantu memperbaiki biaya yang bersangkutan dalam pemeliharaan catatan akuntansi” (Mulyadi, 2008).

Disimpulkan berdasarkan pengertian atau penjelasan diatas bahwa sistem informasi akuntansi merupakan gugusan susunan dan mekanisme berbasis teknologi informasi yang bekerja bersama yang bertujuan untuk mengganti data keuangan sebagai informasi keuangan yang bermanfaat bagi *stakeholder*. Informasi yang didapatkan berdasarkan sistem informasi akuntansi, akan dipakai oleh para *stakeholder* (pengambil keputusan) guna menyusun keputusan.

1.4.3. Akuntansi Pemerintahan

Pengertian akuntansi pemerintahan merupakan “Suatu kegiatan jasa untuk kemudian menyediakan informasi kuantitatif khususnya yang sifatnya itu keuangan, dari entitas pemerintah yang menjadi pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari beberapa pihak yang mempunyai kepentingan atas segala alternatif arah dari seluruh tindakan” (Abdul Halim 2002:143). Menurut, Peraturan Pemerintah no 24 Tahun 2005, mengenai standar akuntansi pemerintahan atau disingkat SAP pasal 1 ayat 5 SAP ini ialah “Serangkaian prosedur manual atau pun juga yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data kemudian pencatatan dan pengikhtisaran, serta juga pelaporan posisi keuangan serta juga operasi keuangan pemerintah”.

Arif dkk (2003), mengatakan bahwa, “akuntansi pemerintahan ini ialah kegiatan atau juga aktivitas pemberian jasa didalam menyediakan suatu informasi keuangan pemerintah, dengan berdasar pada adanya proses pencatatan, pengklasifikasian, penafsiran atas suatu informasi keuangan dan juga pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintahan tersebut”.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntansi pemerintahan merupakan lembaga non-profit pada umumnya yang berhubungan dengan lembaga pemerintahan dan juga beberapa lembaga yang tujuannya untuk melayani masyarakat.

1.4.4. Sistem Akuntansi Penggajian

Menurut Mulyadi (2001:17) “sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah sistem yang dirancang untuk menangani transaksi perhitungan gaji dan upah karyawan dan pembayarannya”. Namun, menurut Sujarweni (2015:127) “sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk memberikan upah dan gaji kepada para Pegawai atas jasa-jasa yang mereka berikan”.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi penggajian merupakan sistem yang menangani kegiatan dan fungsi utama perusahaan yang digunakan untuk menangani transaksi perhitungan gaji karyawan dan pembayarannya.

1.4.5. Gaji

Menurut Permendagri Nomor 6 tahun 2021 Pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa Belanja Pegawai adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota dewan perwakilan rakyat daerah, dan pegawai aparatur sipil negara ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Permendagri Nomor 6 tahun 2021 pasal 1 ayat 4 Gaji PPPK yang selanjutnya disebut Gaji adalah imbalan dalam bentuk uang yang wajib

dibayarkan oleh pemerintah secara adil dan layak kepada PPPK sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan jika gaji merupakan kompensasi dalam bentuk uang yang diberikan kepada pegawai sebagai balas jasa atas pikiran dan tenaga dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemimpin untuk mencapai suatu tujuan dari perusahaan atau instansi pemerintahan.

1.4.6. SIPD dan SIMDA

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 adalah “Suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah”. Sedangkan, Aplikasi SIMDA merupakan “Aplikasi database yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)” (Budiman, dkk. 2013).

1.5. Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Dengan Melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan agar dapat mencapai beberapa tujuan, yakni sebagai berikut:

1. Melengkapi syarat kelulusan pada program studi Diploma III – Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura.
2. Membandingkan teori yang telah dipelajari selama masa kuliah dengan kejadian yang terjadi pada tempat magang

3. Menganalisa permasalahan dan berupaya untuk memberikan saran perbaikan
4. Menerapkan *soft skill* dan *hard skill* yang diperoleh dalam masa perkuliahan

1.6. Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Dengan terlaksananya kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan dapat manfaat kepada pihak yang terkait, yaitu:

1. Bagi mahasiswa pelaksana Praktik Kerja Lapangan (PKL):
 - a. Dapat melaksanakan tugas mata kuliah praktik kerja lapangan (PKL) sebagai syarat wajib kelulusan mahasiswa Ahli Madya (A.Md.Ak) Universitas Trunojoyo Madura
 - b. Mengetahui secara langsung kendala apa saja yang terjadi serta mencari bagaimana solusi menyelesaikan masalah tersebut
 - c. Memperoleh pengalaman kerja dan mengetahui bagaimana penerapan akuntansi di kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2. Bagi Jurusan D-III Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura:
 - a. Fasilitas pengenalan keterampilan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura terhadap Kedinasan
 - b. Sebagai pengalaman yang berguna untuk mahasiswa sebelum lulus dan terjun pada dunia nyata
 - c. mempererat hubungan yang berguna dengan Universitas Trunojoyo Madura sebagai universitas yang menyediakan sumber daya manusia yang ahli kepada pengguna tenaga kerja

3. Bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian

- a. Memberikan tugas dan kontribusi yang positif kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa karena telah membantu dalam penyusunan tugas akhir
- b. Sebagai media pembelajaran untuk membangun kerjasama antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian kab. Jombang dengan Universitas Trunojoyo Madura

4. Bagi Pembaca

- a. Dapat dijadikan referensi yang bisa memberikan pengetahuan dan informasi tentang akuntansi dalam dunia kerja yang sebenarnya
- b. Sebagai bahan pertimbangan yang diharapkan dapat menjadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang sama di masa mendatang.

1.7. Rencana Kegiatan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang terletak di Jl. KH. Wahid Hasyim No.143, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 6141. Praktik kerja Lapangan di mulai pada tanggal 1 Februari – 26 Februari 2021. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Tema yang akan diangkat mengenai Sistem Akuntansi Penggajian, yaitu dengan topik “SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN JOMBANG DENGAN MENGGUNAKAN SIMDA DAN SIPD”.

Tabel 1.1 Rencana Praktik Kerja Lapangan

	Jan-2021				Feb-2021				Mar-2021				Apr-2021				Mei-2021				Jun-2021			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Persiapan Topik dan Tempat PKL																								
Pengajuan Izin Lokasi PKL																								
Arahan & Pembekalan Materi PKL																								
Penetapan Dosen Pem																								
Pel Kegiatan PKL																								
Penyusunan & Penulisan Lap. PKL																								
Konsultasi Dosen Pembimbing																								
Pengumpulan Lap. PKL																								
Presentasi Laporan Hasil PKL																								

1.8. Metode Pengumpulan Data

Dalam menyusun tugas akhir ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, karena menurut pandangan penulis metode ini merupakan metode yang paling sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan penulisan tugas akhir oleh penulis. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan mengumpulkan, mengolah, kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat memperoleh informasi dengan mudah mengenai objek yang diteliti dalam bentuk kata dan bahasa.

Pengumpulan data dalam pembuatan suatu laporan sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat, lalu data tersebut menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam memilih masalah yang akan dibahas atau diteliti, sehingga penulis dapat memperoleh data sesuai dengan masalah yang telah ditentukan dan tidak menimbulkan penyimpangan dalam penulisan Tugas Akhir. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun Tugas Akhir ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara dilaksanakan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara terstruktur kepada pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian, secara garis besar wawancara membahas tentang Prosedur sistem akuntansi penggajian

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ialah teknik mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen yang telah ada, pada teknik ini penulis menganalisis, mencatat, dan membaca dokumen yang telah diperoleh dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten

Jombang. Data yang digunakan terbagi menjadi dua jenis data diantaranya data umum dan data khusus. Adapun data yang diperoleh penulis dari teknik dokumentasi adalah sebagai berikut:

a. Data Umum

Data umum merupakan data yang menggambarkan instansi atau perusahaan mengenai:

- 1) Profil Dinas
- 2) Struktur Organisasi
- 3) Tugas dan Fungsi

b. Data khusus

Data yang dikumpulkan yang berkaitan dengan Sistem Akuntansi Penggajian pada DISDAGRIN Kabupaten Jombang.